



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. ROKIB
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN PEMERINTAHAN
3. NHK : 142001

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 223.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5S-AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT STREET Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 105.470.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 389.807.023

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 5.018.277.023

III. HUTANG Rp. 57.400.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.960.877.023

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.